

**SKRIPSI**

**SOFIE FRIDAYANTI**

**TANGGUNG GUGAT KERUGIAN BAGI  
KONSUMEN OBAT TRADISIONAL CINA**



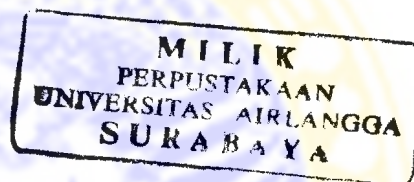
**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

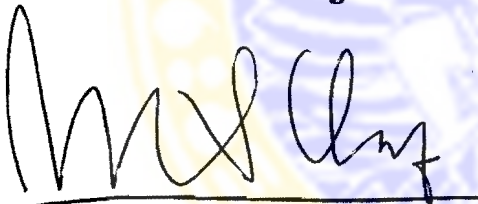
# **TANGGUNG GUGAT KERUGIAN BAGI KONSUMEN OBAT TRADISIONAL CINA**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

**Hj. Moerdiati Soebagyo, S.H., M.S.**  
**NIP. 130287031**

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent 'S' and 'F'.

**Sofie Fridayanti**  
**NIM. 039914786**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Bahwa hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha obat tradisional Cina merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Ini semua terjadi karena pelaku usaha obat tradisional Cina sangat tergantung pada keberadaan konsumen, tanpa adanya konsumen maka kelangsungan usaha pelaku usaha tidak akan berjalan lancar, sebaliknya tanpa adanya pelaku usaha kebutuhan konsumen akan obat tradisional Cina tidak akan dapat terpenuhi. Dengan adanya hubungan yang terus-menerus ini maka kedudukan konsumen dan pelaku usaha obat tradisional Cina adalah seimbang, dimana masing-masing pihak baik konsumen ataupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan atas hak dan kewajiban ini sangat penting agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Bahwa hukum telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional Cina. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pemenuhan ganti rugi dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara gugatan atas dasar wanprestasi atau gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Sedangkan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui perdamaian atau melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK). Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha obat tradisional Cina yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

#### 4.2. SARAN

1. Walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar dan acuan untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga hak-hak konsumen sebagai hak dasar dapat diakui dan ditegakkan sepenuhnya namun masih banyak konsumen yang belum mengerti mengenai undang-undang ini dan bagaimana penerapannya sehingga Undang-undang Perlindungan Konsumen masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga lebih meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu barang yang diproduksinya.
2. Bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara murah, cepat, sederhana dan biaya ringan masih sulit untuk dipenuhi karena

masih terdapat kontradiksi dimana penjelasan pada pasal 54 ayat 3 UUPK menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, ini berarti tidak ada upaya untuk banding dan kasasi, namun pada pasal 56 UUPK menyatakan bahwa para pihak masih diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan atas putusan BPSK dengan menyatakan keberatan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini mengakibatkan putusan BPSK menjadi tidak konsisten jika terjadi keberatan. Untuk itu masih perlu adanya penyempunaan pada BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menerapkan asas murah, cepat dan sederhana.

